

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “ Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Di Kabupaten Pemalang) ” merupakan gagasan dari penulis terhadap keprihatinan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat netral dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Pemalang. Selama ini kita mengetahui bahwa Pemilihan Umum adalah sarana demokrasi untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin dalam tingkatan level yang berbeda. Sejak runtuhnya rezim orde baru pada tahun 1998, aspirasi politik masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya telah berubah secara drastis, khususnya dalam pemilihan umum presiden dan pemilihan kepala daerah. Selama orde baru, yang biasanya dipilih melalui perwakilan melalui DPR dan DPRD, sekarang dipilih secara langsung dengan memilih calon yang telah ditentukan.

Tesis ini merumuskan bagaimana pelaksanaan netralitas Pegawai Negeri Sipil, faktor-faktor yang mempengaruhi netralitas Pegawai Negeri Sipil, kelemahan-kelemahan dan solusi dalam pelaksanaan netralitas Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pemalang. Dalam tujuan tesis ini, penulis menganalisa tentang permasalahan dalam netralitas Pegawai Negeri Sipil dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pemalang, keterlibatan Pegawai Negeri Sipil cukup signifikan. Ada banyak faktor, keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam dukung-mendukung calon kepala daerah, antara lain : mencari jabatan, mobilisasi oleh pimpinan dan janji-janji materi dan non materi oleh calon kepala daerah. Faktor ini merusak tatanan birokrasi yang berdampak pada kinerja aparatur dalam mengurus pemerintahan.

Untuk itu disarankan agar Pengawas Pemilihan Umum dapat bertindak obyektif dan tegas dalam penegakan hukum, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang terbukti terlibat dapat dilaporkan dan diberi sanksi oleh pejabat Pembina Kepegawaian sesuai bobot pelanggarannya.

Kata kunci : Netralitas, Pegawai Negeri Sipil, Pemilihan Kepala Daerah

ABSTRACT

This thesis entitled "Neutrality of Civil Servants In the General Election of Regional Head (Study In Pemalang)" is the brainchild of writer to the concerns of Civil Servants can not be neutral in the Regional Head General Election in Pemalang. So far, we know that the Election is a democratic means to elect representatives or leaders in the levels of different levels. Since the collapse of Rezin new order in 1998, the political aspirations of the people to channel their voting rights has changed dramatically, especially in the presidential elections and the local elections. During the New Order, which is usually selected through representation through the Parliament and the Council, now elected directly by selecting candidates who have been determined.

This thesis formulate how the implementation of the neutrality of the Civil Service, the factors that affect the neutrality of the Civil Service, weaknesses and solutions in the implementation of the neutrality of the Civil Service in Pemalang. In the objective of this thesis, the author analyzes the problems in the neutrality of the Civil Service and provide solutions to these problems.

The results showed that in the local elections in Pemalang, Servants Sipila involvement is significant. There are many factors, involvement of Civil Servants in the carrying-supporting prospective head region, among others: seeking office, mobilization by leaders and promises of material and non-material by the prospective head region. These factors undermine bureaucracy which affects the performance of the apparatus in the care of the government.

It is recommended that the Election Supervisory able to act objectively and decisively in law enforcement, so that Civil Servants are proven to be involved can be reported and sanctioned by the appropriate officials of Trustees Officialdom weight infraction.

Keywords: Neutrality, the Civil Service, local elections